

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN ALUR
PELAYARAN DALAM UPAYA MENCEGAH
KECELAKAAN KAPAL**

TESIS

Oleh

YULIANA RISNA MAENGKOM

2402190027



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2026

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN ALUR
PELAYARAN DALAM UPAYA MENCEGAH
KECELAKAAN KAPAL**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

YULIANA RISNA MAENGKOM

2402190027



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2026



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliana Risna Maenkom
Nim : 2402190027
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Alur Pelayaran Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Kapal”

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saja.
2. Hukum merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 28 Januari 2025



Yuliana Risna Maengkom

NIM: 2402190027



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN ALUR PELAYARAN
DALAM UPAYA MENCEGAH KECELAKAAN KAPAL”**

Oleh :

Nama : Yuliana Risna Maenkom
Nim : 2402190027
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 28 Januari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NUPTK: 7252746647130100


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130143
Dekan

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130143

Fakultas Hukum

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NUPTK: 5434757658137090



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

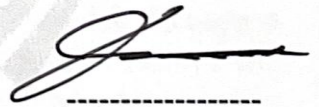
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

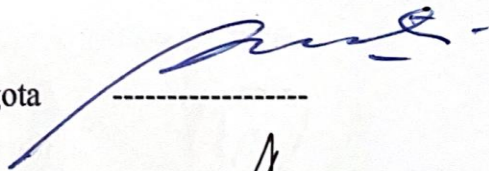
Pada tanggal 28 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

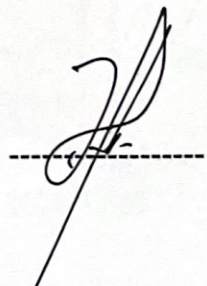
Nama : Yuliana Risna Maenkom
Nim : 2402190027
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN ALUR PELAYARAN DALAM UPAYA MENCEGAH KECELAKAAN KAPAL” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, SH., M.H	Sebagai Ketua	 -----
---	---------------	--

2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H	Sebagai Anggota	 -----
-----------------------------------	-----------------	--

3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H	Sebagai Anggota	 -----
---------------------------------	-----------------	--



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yuliana Risna Maenkom
Nim : 2402190027
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Alur Pelayaran
Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Kapal

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan sata mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2026



Yuliana Risna Maengkom

NIM: 2402190027

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Alur Pelayaran Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Kapal”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat selesai karena bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak.

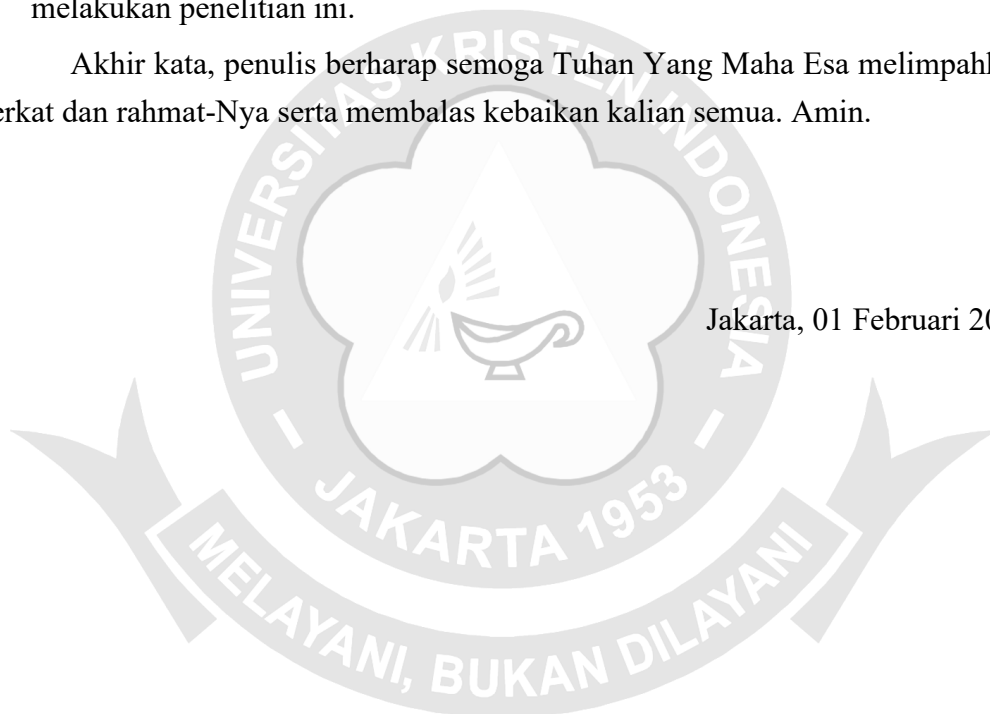
Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. David M.L. Tobing., S.H., M.Kn, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Dr. Dhaniswara K.Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Selaku Wakil Rektor Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
5. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing II .
6. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas ilmu, wawasan, dan inspirasi yang diberikan selama masa perkuliahan beserta seluruh staf Universitas Kristen Indonesia.
7. Keluarga tersayang, orangtua dan saudara terkasih, Ari Sudharsono (suami tercinta) dan Abichail Zefanya Sudharsono (anak tercinta) serta seluruh keluarga besar dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

8. Sahabat-sahabat Caroline Veronica, Lisa Yanzalinda, Natalia Junani dan Kakakku Eprina Manurung, Simon, Pardamean, terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan semangat selama menempuh pendidikan.
10. Kepada Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terima kasih atas masukan dan dukungannya selama penulis melakukan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya serta membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Jakarta, 01 Februari 2026



DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Keaslian -----	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing -----	iii
Halaman Persetujuan Tim Penguji -----	iv
Halaman Pernyataan Publikasi-----	v
Kata Pengantar -----	vi
Daftar Isi -----	viii
Abstrak -----	xi
Abstract-----	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah-----	8
C. Tujuan Penelitian -----	8
D. Metode Penelitian -----	9
1. Secara Teoritis -----	9
2. Secara Praktis -----	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep -----	9
1. Kerangka Teori -----	9
a. Kepastian Hukum -----	10
b. Teori Kemanfaatan -----	12
2. Kerangka Konsep-----	13
a. Pelayaran -----	13
b. Kapal -----	14
c. Kecelakaan Kapal -----	14
d. Alur Pelayaran -----	15
e. Keamanan dan Keselamatan Pelayaran -----	15
F. Metode Penelitian -----	16
1. Jenis Penelitian -----	16
2. Pendekatan Penelitian -----	16
a. Pendekatan Undang-undangan -----	17
b. Pendekatan Analisis -----	17
3. Jenis dan Sumber Data -----	17

a. Jenis Data -----	17
b. Sumber Data -----	17
4. Teknik Pengumpulan Data -----	19
5. Teknik Analisis Data -----	19
G. Orisinalitas Penelitian -----	20
H. Sistematika Penelitian -----	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori -----	24
1. Teori Kepastian Hukum -----	24
2. Teori Kemanfaatan Hukum -----	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pelayaran -----	39
1. Pengertian Pelayaran -----	39
2. Pengertian Pelabuhan -----	42
3. Asas-asas Pelayaran -----	47
C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kapal -----	49

BAB III KENDALA DAN TANTANGAN PENGATURAN

ALUR PELAYARAN DI INDONESIA

A. Pengaturan Alur Pelayaran dalam Sistem Hukum Pelayaran Nasional -----	52
1. Konsep dan Kedudukan Alur Pelayaran dalam Hukum Pelayaran Nasional -----	52
a. Konsep Alat Pelayaran dalam Hukum Pelayaran Nasional -----	59
b. Kedudukan alur Pelayaran sebagai Instrumen Keselamatan dan Kepastian Hukum -----	67
2. Kerangka Regulasi Pengaturan Alur Pelayaran di Indonesia -----	72
a. UU Pelayaran dan Peraturan Pelaksanaannya (PM 129 thn 2016 dan Perubahannya -----	72
b. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Instansi Terkait -----	76
B. Kendala dan Tantangan dalam Pengaturan Alur Pelayaran di Indonesia -----	80

1. Kendala Normatif dan Kelembagaan dalam Pengaturan Alur Pelayaran -----	81
2. Kendala Teknis dan Praktis dalam Impelmentasi Alur Pelayaran -----	84
a. Faktor Human Error -----	84
b. Keterbatasan Sarana Navigasi, Infrastruktur dan Lingkungan -----	87

**BAB IV PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN
KESELAMATAN PELAYARAN DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGAR ALUR PELAYARAN**

A. Peran Hukum dalam Mewujudkan Keselamatan Pelayaran -----	92
1. Regulasi Alur Pelayaran sebagai Instrumen Kepastian Hukum -----	93
2. Regulasi Alur Pelayaran dalam Perspektif Teori Kemanfaatan -----	97
B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Alur Pelayaran yang Berkepastian Hukum -----	102
1. Mekanisme dan Bentuk Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Alur Pelayaran -----	103
2. Penguatan Penegakan Hukum Alur Pelayaran untuk Penegakan Kecelakaan Kapal -----	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan -----	108
B. Saran -----	109

DAFTAR PUSTAKA -----	111
----------------------	-----

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut sehingga pengaturan alur pelayaran memegang peranan strategis dalam menjamin keselamatan pelayaran dan mencegah kecelakaan kapal. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kendala dan tantangan pengaturan alur pelayaran di Indonesia serta peran regulasi hukum dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan penegakan hukum yang berkepastian hukum. Penelitian ini memiliki orisinalitas karena secara khusus menganalisis pengaturan alur pelayaran dari perspektif kepastian hukum dalam konteks pencegahan kecelakaan kapal, yang belum banyak dikaji secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum sebagai pisau analisis untuk menilai efektivitas pengaturan dan penegakan hukum di bidang pelayaran. Kerangka konsep penelitian mencakup konsep pelayaran, alur pelayaran, kecelakaan kapal, serta keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan alur pelayaran di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala berupa disharmonisasi regulasi, lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana kenavigasian, serta rendahnya kepatuhan pengguna jasa pelayaran. Regulasi hukum berperan penting dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan mencegah kecelakaan kapal apabila dirumuskan secara jelas, konsisten, dan ditegakkan secara efektif. Kepastian hukum dalam pengaturan dan penegakan hukum alur pelayaran menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tertib pelayaran dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Alur Pelayaran, Keselamatan Pelayaran, Pencegahan Kecelakaan Kapal, Penegakan Hukum Maritim

ABSTRACT

Indonesia as an archipelagic state is highly dependent on maritime transportation, making the regulation of shipping lanes a crucial element in ensuring maritime safety and preventing ship accidents. This study examines the challenges and obstacles in regulating shipping lanes in Indonesia as well as the role of legal regulation in enhancing maritime safety and law enforcement with legal certainty. The originality of this research lies in its focused analysis of shipping lane regulation from the perspective of legal certainty in the context of ship accident prevention, which has not been comprehensively addressed in previous studies.

This research employs a normative juridical legal research method using a statutory approach and an analytical approach. The theoretical framework consists of the theory of legal certainty and the theory of legal utility as analytical tools to assess the effectiveness of regulation and law enforcement in the maritime sector. The conceptual framework includes the concepts of shipping, shipping lanes, ship accidents, and maritime safety and security as regulated under national legislation and relevant international legal instruments.

The results of the study indicate that the regulation of shipping lanes in Indonesia still faces various challenges, including regulatory disharmony, weak supervision, limited navigational facilities, and low compliance among maritime service users. Legal regulation plays a significant role in improving maritime safety and preventing ship accidents when it is clearly formulated, consistently applied, and effectively enforced. Legal certainty in the regulation and enforcement of shipping lane laws is a key factor in achieving orderly navigation and legal protection for all parties involved.

Keywords: Legal Certainty, Shipping Lanes, Navigation Safety, Ship Accident Prevention, Maritime Law Enforcement